

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim dan pemanasan global saat ini menjadi isu strategis yang memengaruhi kebijakan pemerintah, preferensi investor, serta strategi korporasi di berbagai belahan dunia. Aktivitas manusia, seperti peningkatan emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam secara masif, dan degradasi lingkungan, telah menciptakan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem dan stabilitas sosial. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai inisiatif keberlanjutan yang berupaya mengurangi jejak ekologis sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks tersebut, Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan terdorong untuk menyesuaikan praktiknya dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat demi memperoleh penerimaan sosial (*social license to operate*) serta menjaga reputasi jangka panjang (Suchman, 1995)

Salah satu instrumen utama yang digunakan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi publik adalah *Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting*. Laporan ESG tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi kepada investor dan pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan (Forum, 2023). Sejalan dengan itu, di Indonesia, penerapan ESG telah bergeser dari bersifat sukarela menuju kerangka yang diatur secara formal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, POJK No. 17/POJK.03/2023, dan Surat Edaran No.

16/SEOJK.04/2021 mewajibkan entitas keuangan dan emiten publik menyusun laporan keberlanjutan, yang diperkuat oleh Perpres No. 60/2023 terkait hak asasi manusia dalam strategi nasional (OJK, 2023). Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2025, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan PSPK 1 dan PSPK 2 selaras dengan standar IFRS S1 dan S2 dari ISSB, yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 (IAI, 2025).

Di Swiss, kerangka pelaporan ESG telah menjadi bagian integral dari tata kelola korporasi. Amandemen Pasal 964a–1 dalam Swiss *Code of Obligations* (CO) sejak 2022 mewajibkan perusahaan besar untuk menyusun laporan non-finansial yang mencakup isu lingkungan, sosial, HAM, dan antikorupsi. Mulai 2024, *Ordinance on Climate Disclosures* mewajibkan pengungkapan risiko iklim sesuai rekomendasi TCFD, termasuk emisi *Scope* 1–3 dan strategi transisi menuju net-zero 2050 (BAFU, 2025). Regulasi ini sejalan dengan *double materiality principle* dan didukung oleh ketentuan *due diligence* rantai pasok mineral konflik serta pencegahan kerja paksa anak (Legal, 2025).

Menurut Teori Legitimasi, faktor internal seperti ukuran perusahaan dan sektor industri memengaruhi tingkat dan kualitas pelaporan ESG. Perusahaan besar, karena memiliki sumber daya lebih dan menjadi sorotan publik, cenderung meningkatkan pengungkapan ESG untuk mempertahankan legitimasi. Sektor industri yang memiliki risiko lingkungan dan sosial tinggi, seperti energi atau pertambangan, juga menghadapi tekanan legitimasi lebih kuat sehingga terdorong melakukan pelaporan lebih komprehensif (Wahyuni, 2020).

Pemilihan Indonesia dan Swiss sebagai objek perbandingan didasarkan pada perbedaan yang kontras dalam tingkat kematangan regulasi ESG, struktur ekonomi, dan tekanan pasar. Indonesia, sebagai negara berkembang, sedang berada pada tahap transisi menuju pelaporan ESG yang lebih terstandar, dengan tantangan berupa keterbatasan kapasitas pelaporan dan kualitas data (Global, 2025). Sebaliknya, Swiss, sebagai negara maju dengan sistem keuangan global yang kuat, telah mengintegrasikan pelaporan ESG ke dalam kerangka hukum dan tata kelola korporasi yang matang. Perbedaan ini memberikan peluang penelitian yang lebih kaya, karena memungkinkan analisis pengaruh ukuran perusahaan dan sektor industri terhadap skor ESG dalam dua konteks institusional yang sangat berbeda (ICLG, 2025).

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan ukuran perusahaan dan sektor industri dengan skor ESG masih relatif terbatas, khususnya pada studi lintas negara. Sebagian besar penelitian terdahulu di Indonesia fokus pada pengungkapan keberlanjutan secara umum (Rijal *et al.*, 2023), sementara studi di negara maju lebih banyak membahas hubungan ESG dengan kinerja keuangan (Friede *et al.*, 2023). Minimnya studi yang menguji keterkaitan faktor internal perusahaan dengan skor ESG terukur secara kuantitatif menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang perlu diisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *SIX Swiss Exchange*, untuk melihat bagaimana ukuran perusahaan dan sektor industri memengaruhi skor ESG, serta sejauh mana perbedaan karakteristik negara berperan

sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian tentang ESG, sekaligus memberikan masukan praktis bagi regulator dan pelaku bisnis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan sesuai konteks masing-masing negara. Dengan demikian, penulis ingin melaksanakan penelitian terkait yang berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP SKOR ESG: PERBANDINGAN INDONESIA DAN SWISS”

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim dan pemanasan global telah mendorong adopsi prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Swiss.
2. Regulasi dan standar pelaporan ESG di Indonesia dan Swiss memiliki perbedaan signifikan, baik dari segi tingkat ketatnya aturan maupun kematangan kerangka tata kelola.
3. Faktor internal perusahaan seperti ukuran dan sektor industri diduga memengaruhi tingkat pengungkapan dan kualitas skor ESG.
4. Belum banyak penelitian yang secara langsung membandingkan pengaruh ukuran perusahaan dan sektor industri terhadap skor ESG antara negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti Swiss.

5. Teori Legitimasi relevan digunakan untuk menjelaskan perbedaan perilaku pengungkapan ESG karena perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas serta keterbatasan waktu agar penelitian lebih terfokus, ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Objek penelitian adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *SIX Swiss Exchange*.
2. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari laporan tahunan dan data skor ESG yang dipublikasikan secara resmi dalam *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *SIX Swiss Exchange* dan dapat diakses.
3. Analisis dibatasi pada 3 variabel utama yaitu: Variabel independen (ukuran perusahaan dan sektor industri), Variabel dependen (skor ESG) yang diambil dari sumber data sekunder terpercaya dan Variabel moderasi kelompok (karakteristik negara yaitu Indonesia dan Swiss).
4. Periode pengamatan dibatasi pada data skor ESG tahun 2024 yang tersedia secara publik pada (*Morningstar Sustainalytics*).
5. Penelitian tidak menguraikan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola secara terpisah, melainkan menggunakan skor ESG sebagai indikator gabungan keseluruhan kinerja keberlanjutan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta pembatasan masalah yang telah disebutkan di atas, Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap skor ESG pada perusahaan publik di Indonesia dan Swiss?
2. Apakah sektor industri berpengaruh terhadap skor ESG pada perusahaan publik di Indonesia dan Swiss?
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh ukuran perusahaan terhadap skor ESG antara perusahaan publik di Indonesia dan Swiss?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh sektor industri terhadap skor ESG antara perusahaan publik di Indonesia dan Swiss?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor berikut terhadap skor ESG di antara perusahaan-perusahaan publik dalam dua konteks nasional yang berbeda antara Swiss dan Indonesia, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap skor ESG pada perusahaan publik di Indonesia dan Swiss.
2. Menganalisis pengaruh sektor industri terhadap skor ESG pada perusahaan publik di Indonesia dan Swiss.
3. Membandingkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap skor ESG antara perusahaan publik di Indonesia dan Swiss.

4. Membandingkan pengaruh sektor industri terhadap skor ESG antara perusahaan publik di Indonesia dan Swiss.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang bersifat positif bagi berbagai pihak yang terkait antara lain:

1. Secara teoritis:

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait skor ESG dengan membandingkan pengaruh beberapa faktor kontekstual, seperti negara asal, ukuran perusahaan, dan sektor industri, dalam perspektif lintas negara (*cross-country analysis*).

2. Secara praktis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis, investor, dan regulator dalam memahami dinamika skor ESG, serta membantu perusahaan dalam merumuskan strategi pelaporan yang sesuai dengan ekspektasi global dan lokal.

3. Bagi peneliti selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi landasan awal untuk pengembangan kajian lanjutan terkait skor ESG dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup variabel tambahan seperti tata kelola perusahaan, kualitas audit, atau pengaruh budaya organisasi.